



Determinasi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil

Dwi Arini Nursansiw¹, Agus Khazin Fauzi^{2*}, Baiq Minatul Inayah², Armiani²

¹Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas Mbojo, Bima
Jl. Tendean, Mande, Kec. Mpunda, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram

1. Pendidikan 1 Dasan Agung, Gomong, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: ¹arinidwi298@gmail.com, ^{2*}ozie3889@gmail.com, ³bminatulinayah@gmail.com, ⁴armiani198431s3@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ozie3889@gmail.com

Submitted: 16/01/2023; Accepted: 28/02/2023; Published: 28/02/2023

Abstrak—Penyajian laporan keuangan yang berkualitas merupakan komponen penting bagi sebuah organisasi atau lembaga sehingga harus berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Atas dasar hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel pemahaman standar akuntansi syariah, dewan pengawas syariah, islamic corporate governance terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada BMT Kota Mataram. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada pengelola BMT, dengan jumlah populasi sebanyak 28 BMT dan sampling jenuh digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil temuan menemukan bahwa pemahaman standar akuntansi syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,418 < 1,997$) dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,493 < 1,997$). Sementara itu, islamic corporate governance berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,311 > 1,997$)

Kata Kunci: Pemahaman Standar Akuntansi Syariah; Dewan Pengawasan Syariah; Islamic Corporate Governance; Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.

Abstract—Presentation of quality financial reports is an important component for an organization or institution so that it must be guided by applicable financial accounting standards. On this basis, this study aims to empirically examine the effect of the variables on understanding sharia accounting standards, sharia supervisory boards, Islamic corporate governance on the quality of financial statement presentation at BMT Mataram city. The data collection technique used a questionnaire distributed to BMT managers, with a total population of 28 BMT and saturated sampling was used as a sampling technique. Data analysis using multiple linear regression. The findings found that understanding of Islamic accounting standards has no effect on the quality of presentation of financial statements with a value of $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,418 < 1,997$) and the sharia supervisory board has no effect on the quality of presentation of financial statements which can be seen from the value of $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,493 < 1,997$). Meanwhile, Islamic corporate governance has an effect on the quality of presentation of financial statements with mark $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,311 > 1,997$)

Keywords: Understanding of Sharia Accounting Standards; Sharia Supervisory Board; Islamic Corporate Governance; Quality of Financial Statement Presentation.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang besar, yang salah satunya adalah Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Berdasarkan data dari OJK tahun 2020 jumlah IKNB mengalami peningkatan mencapai 2,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah entitas yang beroperasi namun juga dapat dilihat dari jumlah asset yang dimiliki sebagaimana dikutip dari (Trimulato, 2022) rata-rata jumlah asset di masing-masing lembaga industry keuangan non bank (IKNB) pada periode Oktober 2020-April 2021 mengalami pertumbuhan seperti asuransi syariah sebesar 6,26%, lembaga dana pensiun sebesar 17,79%, lembaga keuangan mikro syariah sebesar 2,24% dan lembaga fintech (pembiayaan) syariah sebesar 85,54%. Pertumbuhan tersebut selaras dengan hasil yang disampaikan oleh (Achdiat, 2021) bahwa ketika terjadinya covid-19 di akhir tahun 2020, industri keuangan syariah mengalami resilensi (daya tahan) yang bagus dengan pertumbuhan asset keuangan syariah sebesar 22,79% dan diperkirakan mengalami pertumbuhan hingga tahun 2021.

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah dikarenakan pangsa pasarnya tidak hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang beragama muslim saja namun juga dinikmati oleh kalangan masyarakat nonmuslim. Hadirnya lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan target operasionalnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menerapkan prinsip dan aturan syariah dalam operasionalnya menjadi momentum kebangkitan dan pertumbuhan market share perbankan syariah. Kenapa demikian? Dikarenakan bahwa BMT yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (Melina, 2020) yang membantu masyarakat kalangan bawah seperti UMKM ketika mengalami kesulitan dalam akses permodalan pada lembaga keuangan lainnya dikarenakan adanya permasalahan seperti proses administrasi yang rumit dan memberatkan sampai



dengan perlu adanya jaminan yang harus disediakan oleh nasabah (Suriadi et al., 2021). Mengingat bahwa BMT banyak diminati oleh kalangan masyarakat, maka sudah sepantasnyalah BMT menunjukkan kinerja yang bagus sehingga tidak mengecewakan stakeholdernya. Salah satu kriteria kinerja BMT bisa dilihat dari penyajian laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan memenuhi prinsip dan aturan sesuai dengan SAK yang berlaku meliputi relevan, reliabel, bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan maupun dapat dibandingkan antar periode (Hanum et al., 2022). Dengan kata lain, laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitatif sebagaimana ini tertuang dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2015).

Merujuk hal di atas, untuk menjamin manajemen menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada sebuah BMT maka harus ditopang atau didukung dengan adanya pemahaman standar akuntansi syariah, dewan pengawas syariah (DPS) dan *islamic corporate governance*. BMT sebagai lembaga keuangan syariah tentu dalam keberlangsungan operasionalnya perlu peran akuntansi yang maksimal, yang salah satunya adalah memberlakukan standar akuntansi syariah (SAK). Melalui penerapan SAK akan membantu pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadi dasar bagi pihak manajemen selaku pengelola dalam pengambilan keputusan yang lebih baik (Hanum et al., 2022). Menurut (Wulandari, 2019) dalam pembuatan laporan keuangan harus dilakukan dengan akhlak syariah meliputi akidah, hukum amaliah, dan akhlak yang selanjutnya prinsip-prinsipnya dikodifikasikan dalam sebuah standar akuntansi syariah dan ini menjadi prinsip dalam perilaku berakuntansi. Dengan demikian, dalam implementasi SAK syariah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, tepat waktu dan lengkap, tentu pengelola keuangan perlu memiliki pemahaman terhadap SAK syariah tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Hanum et al., 2022; Rahmi et al., 2022; Suazhari, 2015). Jika sumber daya manusia (SDM) yang ada memiliki keterbatasan pengetahuan tentang standar akuntansi syariah, kurangnya informasi maupun pelatihan berkaitan dengan penerapan standar akuntansi syariah akan berdampak terhadap kesulitan bagi manajemen dalam menganalisis lingkungan usaha sehingga memengaruhi penyajian laporan keuangan (Wulandari, 2019). Hal ini dikarenakan bahwa memahami pekerjaan akuntansi berarti SDM yang dimiliki harus paham dan cerdas terhadap proses pelaksanaan akuntansi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Oleh karena itu, BMT yang belum mampu menerapkan PSAK syariah ketika menyusun laporan keuangan pertanda bahwa sumber daya manusia memiliki kompetensi dan pemahaman yang kurang dan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Hanum et al., 2022; Rahmi et al., 2022; Suazhari, 2015). Namun di sisi lain, temuan berbeda ditemukan oleh (Nasim, 2010) bahwasanya kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan manajer terhadap SAK syariah.

Faktor selanjutnya yang diduga mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan adalah adanya dewan pengawas syariah (DPS). Menurut (Faozan, 2013; Rahmadieni, 2019) DPS bertugas dalam mengawasi operasional sebuah lembaga keuangan syariah dan merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga praktik yang dijalankan benar-benar berjalan di atas rel syariah, yang artinya bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, seseorang yang berperan sebagai DPS merupakan pakar ekonomi dan ulama yang tidak hanya menguasai bidang *fiqh mu'amalah*, namun juga memahami dan menguasai bidang ilmu keuangan dan perbankan serta memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/ sertifikat dari DSN. Sebab, pemahaman ilmu keuangan dan perbankan akan membantu DPS mengawasi manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar dan prinsip syariah yang berlaku (Prabowo & Jamal, 2017). Mengingat peran DPS yang sangat penting maka sudah sewajarnya DPS menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan pokok yang sudah diatur di dalam fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27. Maka dari itu, laporan keuangan yang berkualitas yang dihasilkan oleh pihak manajemen akan dijamin kredibilitasnya yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Oktaviana, 2020; Suazhari, 2015) bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen, yang artinya bahwa apabila DPS benar-benar menjalankan wewenang dan kewajibannya (peran) bisa dipastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen adalah laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun berbeda dengan temuan (Rahmadieni, 2019; Rini, 2014a) yaitu dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Semakin berkembangnya bank syariah seperti halnya BMT tidak menjamin suatu lembaga terbebas dari tindakan kecurangan walaupun dalam pengelolaannya menggunakan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan hadits. Lihat saja misalnya, salah satu kasus yang pernah terjadi di Dubai Islamic Bank karena laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dan tidak tepat, kehilangan sekitar US\$ 300 miliar. Begitu juga yang terjadi pada Islamic Bank of South Africa yang bangkrut pada tahun 1997 dengan hutang antara 50 juta Rand hingga 70 juta Rand yang disebabkan oleh manajemen dan sistem akuntansi yang buruk dan tidak tepat (Rini, 2014b). Oleh karena itu, adanya perkembangan lembaga syariah yang semakin pesat akan berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang dihadapi, dimana tantangan yang terbesar adalah mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah (Falikhatus & Assegaf, 2012).

Dalam memaksimalkan tata kelola perusahaan pasti ada konflik atau *agency conflict*. Ditambah dengan adanya isu-isu tersebut menarik perhatian bagi berbagai pihak sehingga untuk mencegah dan memberantas hal ini maka

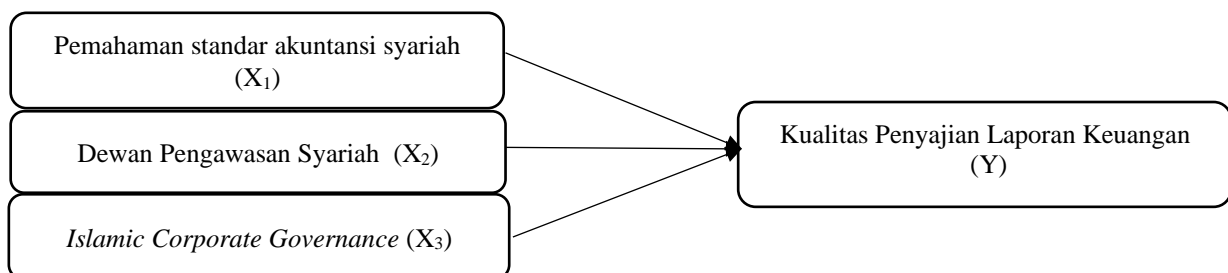


pengawasan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara eksternal dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia sementara internal dapat dilakukan dengan penerapan good corporate governance (konvensional) atau islamic corporate governance (islami). Penerapan islamic corporate governance (ICG) menjadi urgensi untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam memberikan setiap layanan produk dan jasa yang diberikan. Menurut (Sodiq, 2017) islamic corporate governance, merupakan sebuah pengembangan dari konsep corporate governance konvensional tetapi yang membedakan adalah islamic corporate governance dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Prinsip ICG tidak jauh berbeda dengan corporate governance, salah satunya adalah pengakuan, transparansi, dan tanggung jawab, lebih-lebih jika membahas syariah tanggung jawab entitas menjadi lebih luas, baik dari sisi stakeholder dan kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip islamic corporate governance mencakup shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), fathanah (cerdas) dan adil. Dengan demikian, jika tata kelola perusahaan lemah yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan syariah dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan sehingga salah satu dampaknya laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Nugroho, 2015) bahwasanya menerapkan ICG akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan ini tentu berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen sehingga kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kecurigaan masyarakat bahwa BMT sama dengan koperasi simpan pinjam biasa, dengan baju yang berbeda, akan secara pelan-pelan terkikis jika BMT menerapkan islamic corporate governance. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asrori, 2014) bahwa penerapan islamic corporate governance berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan sangat penting bagi peningkatan kinerja islami perusahaan perbankan syariah yang ditandai dengan penyajian laporan keuangan yang berkualitas oleh pihak manajemen. Didukung pula dengan hasil penelitian (Amelinda & Rachmawati, 2021; Prasajo, 2015) bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang konsisten akan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kinerja keuangan. Pihak manajemen perusahaan akan cenderung tidak melakukan rekayasa pada laporan keuangan mengingat adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyajian informasi yang transparan. Namun justru berbeda dengan temuan (Rahmadieni, 2019) tidak menemukan pengaruh islamic corporate governance syariah dengan kualitas penyajian laporan keuangan syariah.

Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan bahwa perkembangan BMT khususnya di Kota Mataram yang merupakan pusat kota yang ada di Pulau Lombok semakin banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk dapat memperoleh modal dalam pengembangan usahanya. Tentu hal ini, BMT akan menunjukkan performa (kinerja) yang bagus dimata stakeholder dengan menyajikan kualitas laporan keuangan yang dimiliki mengingat bahwa laporan keuangan yang berkualitas akan menyajikan informasi yang sesuai dengan aturan, prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, kehadiran BMT akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin menguji secara empiris pengaruh dari pemahaman standar akuntansi syariah, dewan pengawas syariah dan islamic corporate governance terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di BMT yang ada di Kota Mataram.

2. METODE PENELITIAN

Jenis riset dalam penelitian ini adalah asosiatif yaitu riset untuk menguji dan menganalisis hubungan antar variabel yang dalam hal ini adalah variabel pemahaman standar akuntansi syariah, dewan pengawas syariah, islamic corporate governance terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Rerangka Konseptual

Pada gambar 1. rerangka konseptual menunjukkan alur hipotesis dalam penelitian ini dan mengacu kepada pendahuluan maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah :

1. H_1 : Pemahaman standar akuntansi syariah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan BMT di Kota Mataram
2. H_2 : Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan BMT di Kota Mataram
3. H_3 : Islamic corporate governance berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan BMT di Kota Mataram



Sumber data menggunakan data primer yaitu diperoleh secara langsung dari kuesioner yang sudah disebarakan kepada responden yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan BMT yang ada di Kota Mataram (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BMT yang ada di Kota Mataram berjumlah 28 BMT. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel, dimana jumlah sampel yang digunakan berjumlah 84 responden yang diperoleh dari tiap-tiap BMT diambil 3 responden dikalikan dengan jumlah BMT sebanyak 28 BMT. Analisis data dalam penelitian ini dilihat dari analisis deskripsi variabel penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskripsi variabel penelitian digunakan untuk memperoleh gambaran jawaban responden atas masing-masing item pernyataan dengan melihat distribusi frekuensi jawaban sesuai dengan skala pengkategorian hasil jawaban responden (Ferdinand, 2014) sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Pengkategorian Hasil Jawaban Responden

Interval	Pemahaman standar akuntansi syariah (X ₁)	Dewan pengawasan syariah (X ₂)	Islamic corporate governance (X ₃)	Kualitas penyajian laporan keuangan (Y)
1,00– 1,79	Sangat Tidak Paham	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tidak Berkualitas
1,80– 2,59	Tidak Paham	Rendah	Rendah	Kurang Berkualitas
2,60– 3,39	Cukup Paham	Cukup Tinggi	Cukup Tinggi	Cukup Berkualitas
3,40– 4,19	Paham	Tinggi	Tinggi	Berkualitas
4,20– 5,00	Sangat Paham	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Berkualitas

Uji kualitas data berupa uji validitas (mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner) dan uji reliabilitas (mengukur kuesioner reliabel atau handal). Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini terbebas dari asumsi klasik atau tidak meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan variabel independent terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional variabel	Skala
1	Pemahaman Standar Akuntansi Syariah (X ₁)	Pemahaman terhadap standar akuntansi syariah dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BMT yang mengerti dan memahami bagaimana proses akuntansi dalam penyajian laporan keuangan (Rahmadieni, 2019)	Skala ordinal
2	Dewan Pengawas Syariah (X ₂)	Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang bertugas memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan oprasional lembaga keuangan syariah (Hanum et al., 2022)	Skala ordinal
3	Islamic Corporate Governance (X ₃)	Islamic corporate governance didefinisikan sebagai tata kelola yang baik, profesional, dan hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban BMT kepada pihak internal dan eksternal (Sodiq, 2017)	Skala ordinal
4	Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (X ₄)	Kualitas penyajian laporan keuangan syariah adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen yang berisi sesuai dengan informasi yang benar dan jujur yang menyangkut kepentingan pihak internal dan eksternal (Rahmadieni, 2019)	Skala ordinal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Kuesioner disebarakan langsung kepada pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan BMT yang ada di Kota Mataram. Jumlah kuesioner yang berhasil disebar 84 kuesioner namun yang bisa dianalisis lebih lanjut sebanyak 66 kuesioner dengan rincian di bawah ini :

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik responden		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	37	56%
	Perempuan	29	44%
Tingkat Pendidikan	SMA	3	4,5%
	D3	15	22,5%
	S1	48	73%
Pengalaman Kerja	< 5 tahun	23	34,8%



Karakteristik responden		Jumlah	Persentase
Mengetahui standar akuntansi syariah	6-10 tahun	27	41%
	>10 tahun	16	24,2 %
Mengetahui Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	Ya	58	87,8%
	Tidak	8	12,2%
	Ya	58	87,8%
	Tidak	8	12,2%

Gambaran jawaban responden atas masing-masing item pernyataan dilakukan dengan membuat tabulasi dan menghitung persentase setiap variabel dengan hasil :

Tabel 4. Persentase Jawaban Responden Terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Islamic Corporate Governance Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Item	Total Skor					Rata-Rata Persepsi
	Tingkat Penilaian Responden					
	1	2	3	4	5	
Pemahaman standar akuntansi syariah						
X _{1.1}	0	0	24	164	85	4,13
X _{1.2}	0	2	30	160	75	4,04
X _{1.3}	1	4	39	140	75	3,92
X _{1.4}	0	6	33	140	85	4,00
X _{1.5}	1	2	33	144	85	4,01
X _{1.6}	1	2	33	148	80	4,00
X _{1.7}	1	0	33	160	70	4,00
Rerata X ₁						4,01
Dewan Pengawas Syariah						
X _{2.1}	0	2	48	144	65	3,87
X _{2.2}	0	16	45	128	55	3,69
X _{2.3}	1	14	51	132	40	3,60
X _{2.4}	0	6	69	148	9	3,60
X _{2.5}	0	8	48	164	25	3,71
X _{2.6}	0	4	63	156	16	3,68
Rerata X ₂						3,69
Islamic Corporate Governance						
X _{3.1}	0	0	36	180	45	3,95
X _{3.2}	0	4	48	160	64	3,87
X _{3.3}	0	2	48	160	45	3,86
X _{3.4}	1	4	51	156	35	3,74
X _{3.5}	1	8	45	148	45	3,74
X _{3.6}	0	4	42	172	35	3,83
X _{3.7}	0	0	57	156	64	3,83
X _{3.8}	0	2	30	168	65	4,01
X _{3.9}	0	4	30	164	65	3,98
X _{3.10}	1	0	30	168	65	4,00
X _{3.11}	2	6	30	176	35	3,77
X _{3.12}	0	6	33	172	45	3,87
X _{3.13}	0	4	39	176	35	3,87
X _{3.14}	1	14	72	120	16	3,43
Rerata X ₃						3,83
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan						
Y _{1.1}	0	2	27	144	100	4,12
Y _{1.2}	0	4	45	108	110	4,04
Y _{1.3}	0	10	42	132	70	3,84
Y _{1.4}	1	4	27	132	105	4,07
Y _{1.5}	1	4	30	152	75	3,96
Y _{1.6}	1	2	36	160	60	3,92
Y _{1.7}	0	6	24	164	70	4,00
Rerata Y ₁						3,99

Berdasarkan tabel 4 dan mengacu pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa persepsi responden terhadap pernyataan penelitian berkaitan dengan pemahaman terhadap standar akuntansi syariah dengan hasil nilai rata-rata sebesar 4,01 (berkategori paham), dewan pengawas syariah dengan hasil nilai rata-rata 3,69 (berkategori tinggi), Islamic corporate



governance dengan hasil nilai rata-rata 3,83 (berkategori tinggi) dan kualitas penyajian laporan keuangan dengan hasil nilai rata-rata 3,99 (berkategori berkualitas/meningkat).

3.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 5 menyajikan hasil uji validitas dengan hasil penelitian bahwa semua indikator nilai korelasinya atau r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,2023 sehingga dinyatakan valid sedangkan hasil uji reliabilitas diperoleh hasil bahwa semua indikator kuesioner mempunyai nilai koefisien cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 yang berarti semua indikator adalah reliabel.

Tabel 5. Uji validitas dan reliabilitas

Item	Pemahaman standar akuntansi syariah (X ₁)	Dewan Pengawas Syariah (X ₂)	Islamic Corporate Governance (X ₃)	Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Y)
Item 1	0,641	0,652	0,525	0,510
Item 2	0,525	0,590	0,522	0,577
Item 3	0,597	0,703	0,462	0,590
Item 4	0,607	0,784	0,420	0,600
Item 5	0,612	0,333	0,454	0,633
Item 6	0,620	0,487	0,428	0,586
Item 7	0,408		0,342	0,493
Item 8			0,342	
Item 9			0,629	
Item 10			0,423	
Item 11			0,449	
Item 12			0,527	
Item 13			0,340	
Item 14			0,638	
Cronbach's Alpha	0,655	0,626	0,720	0,655

3.3. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas sesuai dengan tabel 6 menunjukkan hasil nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,066 lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi terdistribusi secara normal. Lebih lanjut, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser diperoleh untuk masing-masing variabel yaitu pemahaman standar akuntansi syariah, dewan pengawas syariah dan Islamic corporate governance berada di atas 0,05 yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Regression coefficients	Significance of Glejser test	T hitung	T tabel	Collinearity Statistics	
					Tolerance	VIF
Constant	3,764					
Pemahaman standar akuntansi syariah	0,182	0,194	1,418	1,997	0,703	1,422
Dewan Pengawas Syariah	0,218	0,124	1,493	1,997	0,672	1,488
Islamic Corporate Governance	0,266	0,632	3,311	1,997	0,764	1,308
Variabel dependen adalah kualitas penyajian laporan keuangan						
F tabel		11,616*				
R Square		0,360				
Adjusted R Square		0,329				
Kolmogorov-Sminornov Z signifance		0,066				
*signifikan pada tingkat 0,05						

3.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 menunjukkan hasil bahwa pemahaman standar akuntansi syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada BMT di Kota Mataram sehingga hipotesis pertama (H₁) ditolak, bisa dilihat dari nilai nilai t hitung < t tabel (1.418 < 1.997). Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian



laporan keuangan pada BMT di Kota Mataram sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak, bisa dilihat dari nilai t hitung $<$ t tabel ($1.493 < 1.997$). Selanjutnya, *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada BMT di Kota Mataram sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima, bisa dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel ($3.311 > 1.997$).

3.5 Pembahasan

3.5.1 Pemahaman Standar Akuntansi Syariah dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan BMT di Kota Mataram

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di BMT Kota Mataram sehingga hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nasim, 2010) dan bertolak belakang dengan temuan yang dilakukan oleh (Hanum et al., 2022; Rahmi et al., 2022; Suazhari, 2015). Hasil ini mengindikasikan bahwa BMT di Kota Mataram memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam hal implementasi SAK Syariah secara menyeluruh sehingga belum diterapkan secara optimal khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah walaupun dalam pernyataan responden tinggi mengenai pemahaman standar akuntansi syariah. Sebagaimana hasil ini sejalan dengan temuan dari (Wulandari, 2019) bahwasanya BMT dalam penelitiannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas sehingga belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai aturan dan prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, mengetahui standar akuntansi syariah saja tidak cukup tanpa memahami dan mengimplementasikan SAK syariah secara menyeluruh sehingga sumber daya manusia yang ada sekiranya perlu memiliki dan memahami pengetahuan akuntansi yang tinggi mengenai prinsip dan aturan syariah yang berlaku. Dalam penelitian ini, sebagian besar latar belakang responden di dalam penelitian ini bukan berasal dari akuntansi sehingga diasumsikan bahwa pemahaman tentang standar akuntansi syariah masih dikatakan kurang dan tentunya berdampak dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Didukung pula dengan apa yang disampaikan oleh (Rahmanti, 2012) bahwa selama ini laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola atau pihak manajemen yang dilihat hanya deskripsi kualitatif saja sedangkan laporan keuangan hanya jadi formalitas sehingga berdampak terhadap pegawainya yang belum sepenuhnya memahami SAK syariah yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan.

3.5.2 Dewan Pengawas Syariah dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan BMT di Kota Mataram

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang berkualitas sehingga hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Rahmadieni, 2019; Rini, 2014a) dan bertolak belakang dengan temuan (Lestari & Oktaviana, 2020; Suazhari, 2015). Hasil ini mengindikasikan bahwa peran DPS pada lembaga BMT belum difungsikan secara optimal dalam hal mereview dan memeriksa laporan keuangan dikarenakan kesibukan-kesibukan di tempat lain seperti dosen, ulama, guru maupun da'i. Terkadang ada DPS hanya mengunjungi BMT satu kali dalam sebulan ataupun hanya bisa dihubungi via telepon. Hal tersebutlah yang menyebabkan fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan oleh DPS justru tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, DPS hanya dijadikan objek pelengkap saja bahkan hanya memenuhi ketentuan regulasi yang ada (Faozan, 2014). Di sisi lain, karena kebanyakan DPS memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dalam hal ekonomi dan keuangan, hanya pengetahuan ilmu fiqh muamalah yang dimiliki tentu berdampak terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan oleh DPS dalam hal ini adalah mengawasi kegiatan operasional sebuah BMT, sehingga menyebabkan anggota DPS tidak mengetahui kalau terjadi penyimpangan pada LKS yang diawasinya dan baru mengetahui adanya penyimpangan syariah setelah mendapatkan informasi dari lembaga yang lebih tinggi seperti Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Kurangnya pengawasan dan tidak seringnya DPS menjalankan perannya dalam memeriksa secara berkala transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BMT menjadi pemicu tidak berpengaruhnya DPS terhadap kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BMT (Misbach, 2015). Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa sebagian besar BMT yang ada tidak diawasi oleh DPS dikarenakan ketidakterediaan staf yang kompeten dalam hal pengawasan operasional BMT walaupun pada prinsipnya pernyataan responden mengenai peran dan fungsi DPS dalam mengawasi BMT untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas terbilang tinggi.

3.5.3 Islamic Corporate Governance dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan BMT di Kota Mataram

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Amelinda & Rachmawati, 2021; Asrori, 2014; Nugroho, 2015; Prasajo, 2015) dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil temuan (Rahmadieni, 2019). Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan *islamic corporate governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi BMT yang ada di Kota Mataram dikarenakan *islamic corporate governance* merupakan wujud pertanggungjawaban BMT kepada stakeholder termasuk di dalamnya *shareholders*, leader, employee, executive, government, customer maupun stakeholder lainnya, sehingga agar BMT tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya maka BMT harus dapat mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan *Islamic corporate governance* meliputi *tranparency* (keterbukaan), *accountability and responsibility* (pertanggungjawaban dan pertanggung jawaban), *responsiveness* (ketanggapan), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran) sebagaimana hasil pernyataan responden yang tinggi mengenai tata kelola perusahaan yang islami (*islamic corporate governance*) (Nugroho, 2015;



Sodiq, 2017). Melalui penerapan Islamic corporate governance secara kontinuitas akan mendorong kinerja perusahaan lebih efisien termasuk dalam meningkatkan efisiensi operasional kegiatan perusahaan sehingga akan berdampak terhadap kinerja perusahaan yang meningkat baik dari sisi keuangan maupun non keuangan. Pihak manajemen akan cenderung tidak melakukan rekayasa laporan keuangan mengingat adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip syariah yang berlaku dalam melakukan penyajian informasi laporan keuangan yang transparan. Dengan kata lain, informasi yang ada dalam laporan keuangan lebih berkualitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta hasil pengujian yang sudah dilakukan mengenai determinasi yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pada BMT di Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi syariah dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan BMT di Kota Mataram. Namun, Islamic corporate governance justru berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan BMT di Kota Mataram. Tidak berpengaruhnya pemahaman standar akuntansi syariah dalam hal ini dikarenakan bahwa pengelola belum memahami sepenuhnya mengenai standar akuntansi syariah sehingga dalam penyajian informasi laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah belum maksimal. Begitu juga, dengan tidak berpengaruhnya dewan pengawas syariah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan dikarenakan peran DPS belum difungsikan secara maksimal dalam mengawasi kegiatan BMT dan bahkan sebagian besar BMT yang ada tidak tersedia DPS. Namun dalam hal Islamic corporate governance (tata kelola perusahaan yang islami) sudah diterapkan dalam sebuah BMT dikarenakan tingginya persaingan antar lembaga keuangan menjadi pemicu bahwa BMT harus berbenah diri dan mereformasi dirinya untuk mengimplementasikan Islamic corporate governance. Hasil pengujian dengan R square diperoleh bahwa sebesar 32,9% kualitas penyajian laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini sementara sisanya sebesar 67,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini terbatas hanya dilakukan di wilayah Kota Mataram sehingga tidak berlaku umum untuk semua wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain sehingga memerlukan penelitian lanjutan pada objek yang berbeda. Pentingnya pemahaman standar akuntansi syariah, dewan pengawas syariah dan Islamic corporate governance membutuhkan peran dari semua pihak seperti pemerintah, akademisi maupun instansi terkait untuk terus memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai aturan dan prinsip syariah yang berlaku agar pengelola atau pihak manajemen dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dapat memaksimalkan peran DPS dan bukan hanya formalitas saja serta semakin meningkatkan Islamic corporate governance dalam upaya peningkatan penyajian informasi laporan keuangan yang berkualitas sehingga tidak menyenatkan pihak internal maupun eksternal.

REFERENCES

- Achdiat, I. (2021). Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang & Tantangan. In KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. [https://knks.go.id/storage/upload/1643624661-\[KNEKS\] Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022_270122_Isnaeni A. Upload.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1643624661-[KNEKS] Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022_270122_Isnaeni A. Upload.pdf)
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonometrika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 34–44.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 90–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jda.v6i1.3249>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2015). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. In *Ikatan Akuntan Indonesia (Issue 1). Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Falikhathun, & Assegaf, Y. U. (2012). Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial. *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012*, 1(1), 245–254. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/137/113>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>
- Ferdinand, A. (2014). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen (5 (Lima)). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh SAK Syariah Dan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3728–3740. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144>
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1), 79–93. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634>



- Nasim, A. (2010). Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK Syari'ah, Peran DPS dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPR Syari'ah di Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta). Universitas Padjajaran Bandung.
- Nugroho, M. A. S. (2015). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Prasojo. (2015). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p33-44>
- Rahmadieni, R. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 128–139. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10038>
- Rahmanti, V. N. (2012). Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tubuh Subur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(2), 161–179.
- Rahmi, F., Dahar, R., & Yanti, N. S. P. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Syariah dan Penggunaan Aplikasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis SAK-Syariah dan SAK-ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kota Padang Fitria. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(2), 220–234.
- Rini. (2014a). Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah, Dan Efektivitas Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 143–155. <http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/40>
- Rini. (2014b). The effect of audit committee role and sharia supervisory board role on financial reporting quality at Islamic banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 17(1), 145. <https://doi.org/10.14414/jebav.v17i1.273>
- Sodiq, A. (2017). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. *The International Journal Of Applied Business Tjab*, 1(2), 32–38.
- Suazhari. (2015). Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS Di Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6516>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Suriadi, I., Hailudin, & Sriningsih, S. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Mataram. *Ekonobis*, 7(1), 82–105. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>
- Trimulato. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>
- Wulandari, R. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(1), 1–17. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equalibrium/article/view/82>
- Achdiat, I. (2021). Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang & Tantangan. In *KNEKS Komite Nasional EKonomi dan Keuangan Syariah*. [https://knks.go.id/storage/upload/1643624661-\[KNEKS\] Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022_270122_Isnaeni A. Upload.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1643624661-[KNEKS] Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022_270122_Isnaeni A. Upload.pdf)
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonometrika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 34–44.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 90–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jda.v6i1.3249>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. In *Ikatan Akuntan Indonesia* (Issue 1). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Falikhathun, & Assegaf, Y. U. (2012). Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial. *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012*, 1(1), 245–254. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/137/113>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Faozan, A. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen* (5 (Lima)). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh SAK Syariah Dan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3728–3740. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144>
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1), 79–93. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634>
- Nasim, A. (2010). Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK Syari'ah, Peran DPS dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPR Syari'ah di Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta). Universitas Padjajaran Bandung.
- Nugroho, M. A. S. (2015). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan



- Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Prasojo. (2015). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p33-44>
- Rahmadieni, R. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 128–139. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10038>
- Rahmanti, V. N. (2012). Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tubuh Subur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(2), 161–179.
- Rahmi, F., Dahar, R., & Yanti, N. S. P. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Syariah dan Penggunaan Aplikasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis SAK-Syariah dan SAK-ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kota Padang Fitria. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(2), 220–234.
- Rini. (2014a). Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit , Peran Dewan Pengawas Syariah , Dan Efektivitas Keuangan (Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 143–155. <http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/40>
- Rini. (2014b). The effect of audit committee role and sharia supervisory board role on financial reporting quality at Islamic banks in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 17(1), 145. <https://doi.org/10.14414/jebav.v17i1.273>
- Sodiq, A. (2017). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 1(2), 32–38.
- Suazhari. (2015). Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS Di Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6516>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Suriadi, I., Hailudin, & Sriningsih, S. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram. *Ekonobis*, 7(1), 82–105. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>
- Trimulato. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>
- Wulandari, R. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak. *E-Jurnal Equilibrium Manajemen*, 2(1), 1–17. <https://jurnal.upb.ac.id/index.php/equalibrium/article/view/82>